

KEMERDEKAAN NEGARA- NEGARA MERDEKA LAINNYA KEKUASAAN JERMAN, SPANYOL, DAN PORTUGAS DI AFRIKA

A. Latar Belakang

Awal mula penjajahan Eropa di Afrika dimulai pada abad ke-15 oleh Portugis. Ketika penaklukan Konstantinopel oleh Turki Ottoman pada tahun 1453 menutup jalur perdagangan antara dunia Barat dan Timur, menyebabkan orang-orang Eropa bersaing untuk mendapatkan wilayah yang kaya sumber daya. Daya tarik Afrika sangat terlihat jelas bagi orang Eropa dan penjajah lainnya. Sebab Afrika merupakan benua yang kaya akan sumber daya alam. Menurut para ahli, kawasan Afrika dan Sudan khususnya, memiliki seperempat cadangan emas dunia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika bangsa Eropa sangat berambisi untuk melakukan eksploitasi dan menguasai kawasan Afrika demi kepentingannya sendiri maupun kepentingan bersama (Sulistiowati, 2021).

Pelopor penjelajahan Afrika adalah bangsa Portugis yaitu Bartolomeuz Diaz dan kemudian Vasco da Gama. Pada tahun 1415, Portugis berhasil menaklukkan Ceuta, sebuah pelabuhan di Afrika Utara, karena ingin menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Dan setelah Perjanjian Tordesilas, seluruh kawasan Afrika berhak dikuasai hanya oleh Portugal, sehingga Spanyol tidak mempunyai kebebasan untuk menerapkan kebijakannya di kawasan Afrika. Portugis memperoleh kekuasaan yang semakin besar di Afrika dan mendirikan koloni-koloni yang cukup besar selama 75 tahun. Namun, pada abad ke-17, Portugis terpaksa meninggalkan Afrika karena tekanan kedatangan negara-negara Eropa lainnya (Sulistiowati, 2021). Hampir seluruh Afrika menjadi tujuan orang Eropa. Karena menyimpan potensi industrialisasi Eropa yang maju pada abad ke-19 dan mendorong bangsa Eropa mendominasi kawasan Afrika sehingga menimbulkan persaingan dan konflik di berbagai kawasan Afrika (Riyadi, 2016).

Afrika selatan menjadi sasaran Jerman karena letaknya yang strategis untuk kepentingan industri, yaitu pangsa pasar dan kekayaan alam yang melimpah. Jerman juga ingin memperluas wilayahnya dan membangun kekaisaran global di Afrika Selatan. Jerman menyebarkan propaganda untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Afrikaner, namun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan

ketegangan politik di Afrika Selatan selama Perang Dunia II. Kondisi Afrika Selatan sendiri mengalami perang antar ras saat politik Apartheid dijalankan. Diskriminasi rasial di Afrika Selatan secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam Undang-undang, dengan demikian rakyat kulit hitam menolak klaim kulit putih bahwa kodrat orang kulit putih mempunyai keunggulan dan hak untuk memimpin dan untuk menyatakan penolakan itu tentu keluar dari lingkup gereja yang dikuasi golongan kulit putih untuk membangun gereja yang merdeka. Bangsa Barat juga menyatakan menjunjung tinggi persamaan hak dan martabat semua orang, dan tidak setuju dengan diskriminasi rasial dan politik Apartheid di Afrika selatan. (DIPOYUDO, n.d.).

B. Kekuasaan Bangsa Jerman di Afrika

Jerman datang ke Afrika pada abad ke 19. Pada 1871 Jerman mengalami penyatuan, isu koloni mulai menyibukkan masyarakat dan kepemimpinan Jerman, dan berbagai kelompok lobi memberikan tekanan pada pemerintah untuk proaktif dalam akuisisi koloni di Afrika, dengan alasan bahwa Jerman memerlukan koloni untuk mempertahankan wilayahnya termasuk keunggulan ekonomi. Karena dimasa itu, banyak Negara Eropa sudah memiliki koloni di Afrika dan Asia. Sehingga kepemilikan koloni dianggap penting untuk mendapatkan akses ke sumber daya alam dan pasar baru. Kelompok lobi terkemuka, yang dibentuk setelah penyatuan, termasuk Masyarakat Kolonisasi dan Ekspor Jerman Barat pada 1881, kelompok ini didirikan oleh pengusaha dan pedagang yang ingin memperluas perdagangan Jerman ke luar negeri dan melihat koloni sebagai pasar baru untuk produk Jerman dan sumber bahan baku yang murah, dan Asosiasi Pusat Geografi Komersial dan Promosi Kepentingan Jerman di Luar Negeri pada 1878, kelompok ini didirikan oleh para geographer, ilmuwan, dan politisi yang ingin mempromosikan eksplorasi dan perdagangan Jerman di luar negeri dan percaya bahwa koloni akan membantu untuk mencapai statusnya sebagai kekuatan dunia. Namun, Pemerintah enggan menyetujui pandangan mereka dan menganut gagasan kolonisasi, seperti Kanselir Otto von Bismarck yang khawatir koloni akan menjadi beban keuangan dan militer bagi Jerman dan menyebabkan konflik dengan Negara lain (Smith, 1974).

Pada tahun 1884, di bawah kepemimpinan Kanselir Otto von Bismarck, Jerman akhirnya mendirikan koloni pertamanya di Afrika barat daya, sekarang Namibia, dan mulai menjajah kawasan Afrika. Pada masa penjajahan Jerman, timbul konflik antara Jerman dengan suku asli, khususnya suku Namaqua. Di bawah kepemimpinan pemimpin suku Hendrik Witbooi, suku Namaqua melakukan perlawanan sengit terhadap penduduk Jerman, namun perlawanan Namaqua gagal. Pada tahun 1894 Hendrik Witbooi harus menandatangani perjanjian kekalahan dengan Jerman. Artinya perjanjian tersebut tetap memberikan izin kepada suku Namaqua untuk memiliki senjata, dan Witbooi dibebaskan setelah memberikan jaminan bahwa dia akan melanjutkan pemberontakan Hottentot. Juga pada tahun 1894, Theodor Leutwein diangkat menjadi gubernur Jerman di Afrika Barat Daya, dengan demikian menerapkan prinsip kolonialisme tak berdarah. Namun usahanya gagal. Hingga tercapainya kesepakatan protektorat yang menjamin stabilitas, semangat pemberontakan tetap hidup. Resimen elit Jerman dikerahkan dan tidak ada perdamaian yang terjalin antara penjajah dan penduduk setempat. Meskipun demikian, Namibia adalah satu-satunya koloni Jerman yang cocok untuk kolonisasi kulit putih (Pratignyo et al., 2022).

Kebijakan Kolonial Jerman di Afrika

Kebijakan koloni Jerman beremigrasi dan mencoba membangun tanah air baru. Afrika Barat Daya menjadi contoh sempurna kolonialisme rasialisme kolonialisme Jerman. Pemerintah Jerman mendukung penjajahan kulit putih hingga menguasai tanah air dan memperkenalkan kerja paksa yang serupa dengan perbudakan. Gubernur Theodor Leutwein dituduh menerapkan kebijakan non-kekerasan dan tidak menyukai pertumpahan darah. Akhirnya ia digantikan oleh jenderal yang sangat kejam, Lothar von Trotha. Pada tahun 1904, kerusuhan lokal menyebabkan Perang Herero dan Namaqua, yang sebelumnya von Trotha memberikan ultimatum kepada tentara Herero untuk mencabut kewarganegaraan mereka dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan daerah tersebut atau dibunuh. Pasukan Herero mundur ke wilayah Omaheke, di mana tidak ada persediaan air di Gurun Kalahari bagian barat dan banyak yang mati kehausan. Pasukan Jerman diperintahkan untuk menembak semua pria dewasa Herero, dan

hanya sedikit yang berhasil melarikan diri ke daerah terdekat di bawah kekuasaan Inggris. Peristiwa ini dikenal sebagai Genosida Herero dan Namaqua (Pratignyo et al., 2022).

Jerman menerapkan sistem hierarki ras yang ketat yang menyebabkan diskriminasi dan penindasan budaya di Afrika. Dalam Perang Dunia I, Afrika Selatan melancarkan serangan militer dan menduduki Namibia dengan dasar perjanjian perwalian Dewan Liga Bangsa-Bangsa. pada 1946, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) bubar dan digantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintahan Afrika Selatan memasukkan Namibia kedalam wilayahnya namun secara tidak resmi dan ditetapkan menjadi provinsi kelima Afrika Selatan dengan politik Apartheid. Selain itu, Jerman juga membangun jalan dan rel kereta api yang bertujuan untuk administrasi kolonial dan eksploitasi ekonomi pada masa jajahannya (DIPOYUDO, n.d.).

C. Kekuasaan Spanyol di Afrika

Jalur penjajahan Spanyol di benua Afrika dimulai melalui Kepulauan Canary hingga Maroko. Wilayah Maroko ini merupakan wilayah penjajahan Spanyol terpenting di Afrika. Selain melintasi Kepulauan Maroko, bangsa Spanyol menjelajahi Samudera Afrika melalui wilayah sepanjang Samudera Atlantik, sepanjang jalur Benua Amerika - Samudera Pasifik - Indonesia - Samudera Hindia - Tanjung Harapan - kembali ke Spanyol. Penjelajahan lautan dilakukan oleh Magellan pada tahun 1519–1521 dan oleh Loaisa pada tahun 1526–, hanya berakhir di Filipina. Kolonisasi Spanyol di benua Afrika tidak terlalu signifikan, hal ini dapat dikaitkan dengan Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Perjanjian Tordesillas dilatarbelakangi oleh konflik antara Portugal dan Spanyol mengenai penguasaan wilayah di "Dunia Baru" menyusul penjelajahan lautan oleh Portugal dan Spanyol. Untuk mengatasi masalah ini, Paus Alexander VI mengeluarkan dekret. sebuah “keputusan kepausan.” Isinya tentang pembagian dunia di luar benua Eropa menjadi dua bagian, yaitu bagian barat untuk Portugal dan bagian timur untuk Spanyol (Wari, 2020).

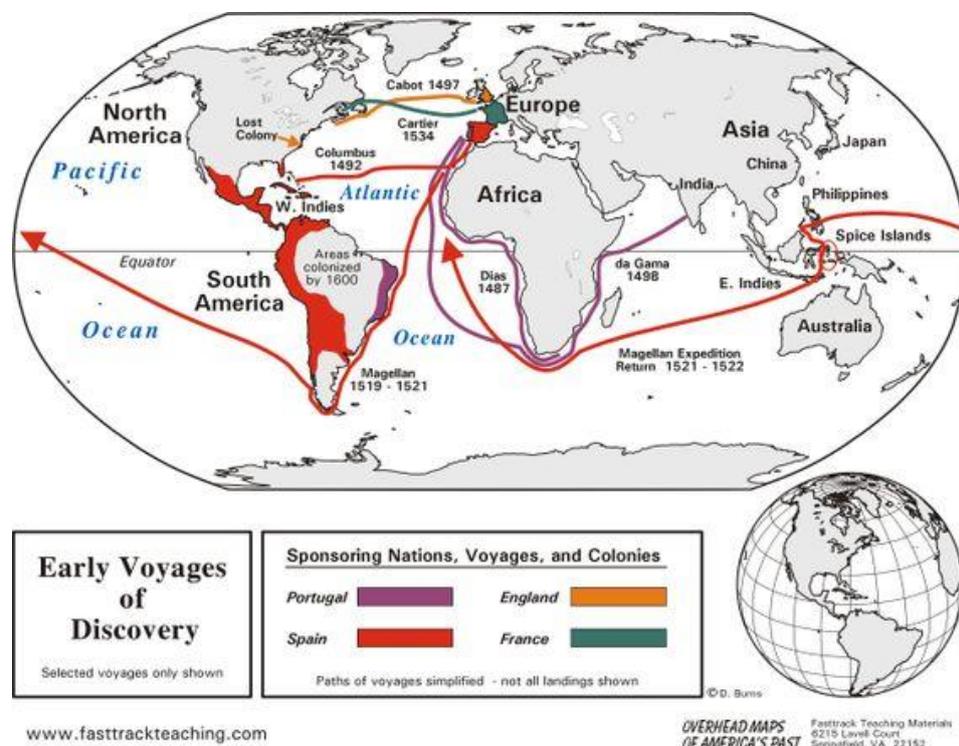
Wilayah Afrika yang dikuasai Spanyol adalah Ifni, Rio de Oro, Ginea dan Maroko. Sebagai negara Eropa yang hampir merokok, Spanyol menjajah

Maroko dengan intensitas yang lebih besar karena seringnya terjadi bentrokan antar negara Barat. Maka pada tahun 1094, Perancis dan Spanyol mengadakan perjanjian rahasia yang membagi zona merokok menjadi dua zona, yaitu flu Perancis dan flu Spanyol. Prancis menguasai hampir seluruh Meksiko dan Spanyol menguasai sebagian kecil wilayah barat daya Sahara Spanyol. Namun pendudukan Spanyol di wilayah Sahara menuai kecaman luas dari masyarakat internasional. Spanyol, yang menguasai wilayah tersebut sejak tahun 1912, menarik diri pada tahun 1976. Selain Sahara Spanyol dalam perjanjian tersebut Fes (1912) Spanyol juga menaklukkan wilayah sekitar Melilla dan Ceuta. Pada tahun 1920, Komisaris Jenderal Spanyol Damaso Berenguer memutuskan untuk menaklukkan wilayah timur suku Jebala, namun hal yang dilakukannya kurang efektif (Darsiti, 2012).

Penerapan imperialisme kuno di Spanyol mengacu pada tiga elemen utama: Gold, Glory, dan Gospel. Untuk mencapai tujuannya, Spanyol menyatukan negara-negara pribumi di bawah satu pemerintahan dan satu keyakinan agama, yaitu keyakinan Kristen. Untuk mencapai tujuan ini, banyak gereja didirikan di koloni untuk mengubah penduduk asli menjadi Katolik. Selain itu, para ulama secara intensif melatih beberapa kelompok yang terdiri dari penduduk asli untuk mengajari mereka perilaku dan budaya Eropa yang patut mereka tiru. Selain itu, Spanyol juga membangun infrastruktur perekonomian yang memadai di wilayah jajahannya, sehingga menjadikan wilayah jajahan Spanyol termasuk salah satu wilayah yang paling maju saat itu dibandingkan wilayah jajahan lainnya di benua Afrika (Sulistiowati, 2021).

Pada tahun 1860, setelah Perang Tetouan, Maroko menyerahkan Sidi Ifni ke Spanyol, yang terbagi antara Prancis dan Spanyol pada tahun 1911. Karena ketidakmampuan militernya, tentara Spanyol akhirnya memberontak pada tahun 1921. Pemberontakan ini merupakan ancaman bagi posisi Spanyol, namun masih dapat direbut kembali. Pada tahun 1956 Prancis mengakui kemerdekaan Maroko. Selanjutnya Sultan Mohammed V melakukan perundingan dengan pemerintah Spanyol yang menghasilkan pengembalian sisawilayah Maroko yang masih dikuasai Spanyol kepada pemerintah Maroko. Akhirnya, dengan

dihapuskannya pemerintahan internasional di Tangier di bawah tekanan masyarakat internasional, Maroko akhirnya menjadi negara yang bersatu dan merdeka sepenuhnya, dan Spanyol akhirnya menyerahkan Maroko kepada Sidi Ifni. Begitu pula pada tahun 1959 Spanyol harus membebaskan koloni Spanyol di Guinea, yang diperlakukan sama seperti provinsi Spanyol lainnya. Di bawah tekanan kelompok nasionalis Guinea dan PBB, Spanyol akhirnya menyerah, pada bulan Maret 1968. Setelah kemerdekaan, Guinea mempunyai pendapatan tertinggi dibandingkan negara Afrika lainnya yang baru saja merdeka (Sulistiowati, 2021).



Gambar 1. Rute Perjalanan Spanyol di Afrika

<https://i.pinimg.com/564x/fd/99/c2/fd99c2eba43eb137f14da776faad687d.jpg>

Kebijakan Kolonial Spanyol di Afrika

Beberapa kebijakan Spanyol di Afrika yaitu :

1. Pemerintah Spanyol telah membeli sejumlah besar lahan pertanian yang kaya akan sumber daya alam. Mengingat perubahan iklim dan volatilitas pasar dunia, Spanyol ingin memastikan akses terhadap sumber pangan

yang stabil dan pada saat yang sama mendapatkan keuntungan dari sektor pertanian yang menguntungkan negara lain.

2. Memanfaatkan dan memodernisasi pertambangan dan pelabuhan. Pelabuhan tersebut digunakan untuk mengekspor sumber daya mineral Afrika dan mengimpor produk industri dari Spanyol, sejak perusahaan Spanyol TCB Group menandatangani kontrak untuk pembangunan dan konstruksinya pada tahun 2019, melayani terminal peti kemas di pelabuhan Tanger Med di Maroko.
3. Spanyol setuju untuk menyerahkan wilayah Sahara Barat kepada Maroko di hadapan pengadilan internasional. Hal ini jelas disambut baik oleh masyarakat Maroko, namun tidak oleh Front Polisario yang mengkritik perubahan kebijakan Spanyol sebagai sebuah pengkhianatan.
4. Mengembangkan infrastruktur perekonomian yang memadai di wilayah tersebut sehingga wilayah jajahan Spanyol termasuk wilayah termaju saat itu, seperti jalan, pelabuhan, pertambangan, dan perkebunan. Namun perkembangan ini tidak merata di seluruh koloni dan menimbulkan dampak yang kompleks.
5. Spanyol secara lepas tangan menyerahkan 2/3 wilayah Sahara Barat ke tangan Maroko, sedangkan 1/3 dari Sahara Barat dilepaskan ke Mauritania, dari timur ke selatan. Karena kedua bagian ini hanya mengacu pada Madrid accord kedua negara ini pun lanjutkan tindakannya untuk menguasai daerah Sahara Barat sesuai dengan pembagian di dalam Madrid accord. Maroko menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar dan menerobos masuk ke dalam wilayah Sahara Barat, dan Mauritania juga menempatkan militernya masuk ke Sahara Barat, tindakan ini juga didorong oleh adanya gerakan dari Polisario yang mendeklarasikan dirinya sebagai republik demokratik Arab Sahrawi (RDAS) kedua negara ini ingin mengamankan wilayah teritori mereka masing-masing sekaligus wilayah mereka di Sahara Barat.

(Hadiyanto, 2016)

Selama Perang Dunia Pertama, Spanyol tetap netral, namun ikut serta dalam beberapa pertempuran di Afrika, antara lain Pertempuran Annual dan Perang

Rif, dimana masyarakat Afrika melakukan perlawanan terhadap negara imperialis Spanyol yaitu Maroko yang hampir seluruh penduduknya menganut Islam. dan menolak Islam. . mempunyai pengaruh terhadap agama non-Muslim yang didirikan Spanyol di Maroko. Perlawanan bangsa Maroko sendiri dipimpin oleh Amir Abdul Karim, seorang pahlawan Rif yang sangat terkenal pada tahun 1921-1926, yang mempertahankan kemerdekaan dan jati dirinya serta berhasil mengalahkan pasukan Spanyol yang di beberapa daerah disebut sebagai pertempuran Annual tahun 1921, namun akhirnya dikalahkan oleh pasukan Spanyol dan Perancis dengan menggunakan senjata kimia, yang disebut Perang Rif. Perang Dunia Pertama melemahkan kekuatan Spanyol di Afrika (Darsiti, 2012).

Selama Perang Dunia II, Spanyol tetap netral tetapi memberikan bantuan kepada Nazi Jerman dan Italia. Spanyol akhirnya ikut serta dalam Pertempuran Sidi Ifni yang dikalahkan oleh pasukan Prancis, dan dalam Pertempuran Ceuta. Kekuasaan Spanyol mengalami kemunduran pada akhir abad ke-19 akibat melemahnya kekuasaan Spanyol dan hilangnya banyak wilayah jajahan di Afrika akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Koloni Spanyol terakhir di Afrika, wilayah Guinea Ekuatorial, memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1968 (Darsiti, 2012).

D. Kekuasaan Portugis di Afrika

Portugis mulai menjelajahi pantai Afrika pada abad ke-15. Pada tahun 1415 mereka menaklukkan Ceuta, sebuah kota di Maroko utara yang menandai dimulainya kolonialisme Eropa di Afrika. Kekuasaan Portugis di Afrika berlangsung selama beberapa abad, dimulai dengan pendudukan Portugis di Afrika Selatan pada abad ke-15 dan berakhir dengan pembebasan negara-negara Afrika pada abad ke-20. Perubahan politik di Portugal pada tahun 1974 yang dikenal dengan Revolusi Bunga memperkuat penegakan demokrasi dan memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada koloni Portugis (Atma Jaya, 2009).

Penaklukan Portugal yang paling penting pada saat itu adalah penaklukan Angola pada tahun 1482, yang mencakup wilayah sekitar 500.000 mil persegi, diikuti oleh

Mozambik pada tahun 1505, yang mencakup wilayah seluas 300.000 mil persegi. Jika keduanya digabungkan dan dijumlahkan dengan luas Guinea, maka luasnya sama dengan luas Eropa Barat. Selama lima abad, Portugal berhasil memperluas pengaruhnya di koloni-koloninya di Afrika, dan sementara negara-negara Eropa yang memiliki koloni di Afrika pada tahun 1menjalankan kebijakan imperialis modern, hingga akhir Perang Dunia II, politik Portugis masih menggunakan sistem lama yang benar-benar unik: arus muncul Pada tahunia datang ke Portugal untuk memperbarui sistem politik koloninya. Salah satu alasan Portugal mempertahankan wilayahnya di wilayah Angola adalah karena Portugis mampu menguasai jalur perdagangan budak dan emas. Pada abad ke-19 hanya terdapat 1.832 orang kulit putih di wilayah tersebut (Hadiyanto, 2019).

Meningkatnya jumlah orang Portugis di wilayah Angola tidak dibarengi dengan membaiknya kontrol administratif oleh pemerintah kolonial, dan akibatnya banyak terjadi konflik di wilayah tersebut yang meskipun dipahami, dapat mengancam posisi pemerintah kolonial. Selain itu, jumlah penduduk kulit putih yang sedikit karena tidak memiliki sistem kekebalan yang sama dengan penduduk asli sehingga mudah terkena penyakit tropis (Riyadi, 2016: 81).

Pada awal abad ke-16, Portugis terlibat dalam perdagangan budak di Afrika. Pada tahun 1550-an, kapal-kapal Portugis membawa budak dari Afrika ke seluruh belahan dunia; Afrika sendiri merupakan pemasok budak di Mesir kuno dan Roma (Berkin Carol, 2013). Pada tahun-tahun awal perdagangan budak transatlantik, Portugis membeli budak Afrika selama perang suku. Ketika permintaan akan budak meningkat, Portugis mulai bergerak lebih jauh ke Afrika untuk mengambil tawanan secara paksa. Setelah ditangkap, orang-orang Afrika yang diculik itu dibawa ke pantai sejauh 300 mil dengan rantai di pergelangan kaki mereka dan barisan tahanan diikat dengan tali di leher mereka. Oleh karena itu, diperkirakan 10 hingga 15 persen narapidana meninggal dalam perjalanan menuju pantai. Sebelum perdagangan budak Afrika dimulai pada tahun, Portugis menggunakan orang India sebagai budak di bidang pertanian dan pertambangan (Indah Mutia Rahma, 2023).

Pada awal abad ke-17, Portugal mendapat tekanan dari negara lain seperti Belanda dan Inggris, yang menyebabkan ketidakstabilan kekuasaan Portugis di Afrika. Belanda mendirikan koloni di São Tomé dan Príncipe pada tahun 1599 dan di Angola pada tahun 1641 dan pada saat yang sama menguasai perdagangan rempah-rempah di Afrika Timur. Demikian pula Inggris menduduki beberapa wilayah Portugis di Afrika Barat, seperti wilayah Gold Coast pada tahun 1662 dan Gambia pada tahun 1664. Persaingan komersial antara Belanda, Inggris, dan Portugis semakin ketat hingga Portugis sulit bersaing dalam persaingan harga dan kualitas. Diproduksi pada tahun oleh Belanda dan Inggris. Pada abad ke-20, Revolusi Bunga yang terjadi di Lisbon pada tanggal 25 April 1974 merupakan kudeta yang menggantikan pemerintahan yang sebelumnya berbentuk kediktatoran. Ketika Revolusi Bunga pecah, Portugal membebaskan wilayah jajahannya di Asia dan Afrika, seperti Timor Timur, yang akhirnya memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itu, kedatangan pemerintahan baru Portugis membawa perubahan dalam konstelasi politik Timor (Mahendra et al., 2022).

Kebijakan Koloni Portugis di Afrika

Dalam melaksanakan kolonialisme, Portugis menggunakan sistem politik kolonial yang berdasarkan persamaan ras dengan perbedaan budaya, yang umumnya disebut politik patrimonial, khususnya di bidang pendidikan. Dan dalam menerapkan prinsip ini, Portugis termasuk negara kolonial yang paling meremehkan politik rasial. Namun kebijakan kolonial yang tidak mengakui diskriminasi rasial hanya merupakan cerminan dari sistem yang ada di Portugal. Di bawah Dr. Pada masa kediktatoran Salazar, pemerintahan pada tahun bersifat otokratis dengan sentralisasi ketat yang tidak memungkinkan pemikiran demokratis di daerah jajahan. Setelah pemerintahan otokratis Salazar, penerapan undang-undangnya gagal dan sebagian besar tidak berubah (Nurlaila, 2019).

Dengan menerapkan kebijakan warisan budaya, Portugis berharap dapat menciptakan kelompok elit di antara penduduk asli. Kebijakan-kebijakan ini berdampak pada penduduk Afrika dan pada akhirnya menunjukkan bahwa sejumlah besar pemukim tidak memiliki hak-hak sipil dan secara brutal dan kejam dipaksa bekerja untuk pemerintah dan koloni kulit putih. Pemerintah juga telah

mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki sertifikat petani no. dan jika mereka tidak memiliki sertifikat ini maka mereka harus mencari pekerjaan. Pemerintah kolonial Portugis di Afrika melakukan diskriminasi budaya terhadap masyarakat adat. Diskriminasi budaya terlihat jelas dalam aturan bahwa semua perempuan berpakaian tradisional harus duduk di kelas tiga di kereta, sementara penduduk setempat yang berpakaian dan berperilaku seperti orang Portugis diperbolehkan bepergian dengan kereta api. Kegiatan mahal, biaya masuk ke hotel dan restoran, dan orang Afrika dapat menonton pertunjukan di bioskop setelah menunjukkan kartu asimilasi (Darsiti, 2012).

Dampak Koloni Portugis di Afrika

Pengaruh koloni Portugis di Afrika terhadap bidang ekonomi, agama dan pendidikan. Dalam bidang perekonomian, segala kegiatan perekonomian hanya dapat dilakukan atas nama raja, sehingga mereka kehilangan prakarsa dalam bidang perekonomian dan juga menjadi bangsawan yang sangat komersial, sehingga menggunakan cara-cara feodal untuk memenuhi kebutuhannya. Semula penduduk asli menganut agama yang menyembah berhala dan patung, namun pada tahun, dengan kedatangan bangsa Portugis, mereka mengganti berhala yang disembah penduduk asli dengan agama Kristen. Saat itu pendidikan penduduk pribumi masih sangat pas-pasan, sehingga Portugis memanfaatkannya dan mengandalkan landasan agama Kristen. Masyarakat adat mendapat pendidikan di gereja-gereja dimana gereja berperan sangat aktif. dalam menjaga kepatuhan penduduk asli dengan mengajarkan keterampilan dasar Eropa seperti membaca, menulis dan berhitung. Selain itu, para ulama juga tak lupa menularkan dogma-dogma iman Kristen agar masyarakat adat tetap patuh dan disiplin kepada penguasa. Namun proses akulturasi tersebut mengakibatkan penduduk pribumi tidak mempunyai keterampilan yang sama dengan masyarakat kulit putih, sehingga menjadikan penduduk pribumi tidak mampu berpikir, terbuka dan aktif. Dengan kata lain, hal tersebut dapat mengakibatkan karakter masyarakat adat tetap inferior (Darsiti, 1969).

Pada abad ke-20, sebagian besar koloni Portugal di Afrika memperoleh kemerdekaan setelah bertahun-tahun perang kemerdekaan. Mozambik, Angola, Guinea-Bissau dan Kepulauan Cape Verde adalah beberapa contoh koloni yang memperoleh kemerdekaan dari Portugal. Namun jejak kekayaan budaya dan sejarah Portugis masih terlihat di beberapa negara Afrika yang pernah menjadi jajahannya (Nurlaila, 2019).

E. Gerakan Kemerdekaan Negara-Negara Kolonial di Afrika

Proses dekolonisasi di Afrika terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika negara-negara terjajah menuntut hak kemerdekaan dari pemerintahan kolonial, yang terjadi antara tahun 1945 dan 1975, dan banyak negara Afrika memperoleh kemerdekaan dari negara-negara jajahan Eropa. Pada akhir tahun 1975, meskipun permasalahan kolonial masih berlanjut di Afrika (Rachman, 1974).

1. Kenya

Kemerdekaan Kenya menantang pemerintahan kolonial Inggris, dan Pemberontakan Mau-Mau tahun 1952 berlangsung selama tujuh tahun dan berhasil ditindas oleh pemerintah Inggris, yang menimbulkan tekanan internasional untuk kemerdekaan Kenya. Dengan juru bicara Jomo Kenyatta, Kenya memperoleh kemerdekaan pada 12 Desember 1963, dan Jomo Kenyatta menjadi Perdana Menteri pertama.

2. Tanganyika

Kemerdekaan Tanganyika dalam menentang pemerintahan kolonial Jerman dengan tokoh Yulis Nyrere seorang pemimpin Tanganyika African National Union (TANU) untuk menyuarakan kemerdekaan penuh dari Inggris. Akhirnya pada Mei 1961 Tanganyika mendapatkan hak untuk mengatur pemerintahan dan pada desember 1961 Tanganyika resmi merdeka.

3. Kamerun

Bangsa Portugis memberi nama Kamerun dengan Rio Dos Camaoes. Kamerun adalah protektorat Jerman sebelum Perang Dunia I, tetapi setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, Kamerun diserahkan kepada Inggris Raya dan Prancis, yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (LBB). Kamerun

diperintah oleh Perancis, memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960, dan memperoleh kemerdekaan di bawah pemerintahan Inggris pada tahun 1961. Setelah konstitusi diterbitkan pada tahun 1972, Kamerun diintegrasikan ke dalam Republik Persatuan Kamerun dengan Presiden merangkap sebagai kepala pemerintahan.

4. Republik Somalia

Republik Somalia terletak di Tanduk Afrika dan dikendalikan secara terpisah oleh Inggris dan Italia. Warga Somalia Britania mulai memperjuangkan kemerdekaannya dan merdeka pada Juni 1960, sebulan setelah Somalia berada di bawah kekuasaan kolonial Italia dan keduanya bersatu membentuk Republik Somalia. Republik ini menganut sistem demokrasi parlementer hingga tahun 1969, ketika presiden dibunuh dan pemerintahan diambil alih oleh militer.

5. Angola

Portugis adalah orang pertama yang mencapai Angola di bawah pimpinan Diago Cao. Pada saat yang sama, Inggris memperluas wilayahnya dan ingin menguasai Angola hingga Inggris setuju untuk menguasai wilayah perbatasan. Setelah Perang Dunia II, Portugis mengubah status hukum tanah jajahan menjadi Provinsi Sebrang Laut dan memberikan kemerdekaan pada 1975.

6. Mozambik

Mozambik pernah menjadi jajahan Portugis karena terdapat budaya Portugis yang kuat di sana. Pada tahun 1964, sebuah kelompok pemberontak bernama Frelimo (Front Pembebasan Mozambik) lahir untuk memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya, setelah kekacauan di pemerintahan Portugis, Mozambik resmi merdeka pada bulan Juni 1975, dengan Samora Machel menjadi presiden pertama dari tokoh Frelimo.

(Riyadi, 2016)

Setelah memperjuangkan kemerdekaan melawan kekuatan kolonial di Afrika. Namun karena negara Afrika sejak awal terdiri dari berbagai suku, ras, dan etnis, berbagai permasalahan seperti masalah persatuan nasional masih terus bermunculan hingga berujung pada perebutan kekuasaan dan perang saudara yang

biasa terjadi di Afrika. Terlebih lagi, Afrika dipandang sebagai benua yang penuh kerusuhan. Perekonomian Afrika pada awalnya makmur dan stabil setelah melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Namun adapihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga terlihat dari korupsi bantuan luar negeri dalam jumlah besar sehingga menimbulkan kemiskinan di berbagai belahan Afrika (Riyadi, 2016).

F. Rangkuman

Jerman datang ke Afrika pada abad ke 19. Jerman menerapkan sistem hierarki ras yang ketat yang menyebabkan diskriminasi dan penindasan budaya di Afrika. Dalam Perang Dunia I, Afrika Selatan melancarkan serangan militer dan menduduki Namibia dengan dasar perjanjian perwalian Dewan Liga Bangsa-Bangsa. pada 1946, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) bubar dan digantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Spanyol telah membeli sejumlah besar lahan pertanian yang kaya akan sumber daya alam. Mengingat perubahan iklim dan volatilitas pasar dunia, Spanyol ingin memastikan akses terhadap sumber pangan yang stabil dan pada saat yang sama mendapatkan keuntungan dari sektor pertanian yang menguntungkan negara lain. Dengan menerapkan kebijakan warisan budaya, Portugis berharap dapat menciptakan kelompok elit di antara penduduk asli. Kebijakan-kebijakan ini berdampak pada penduduk Afrika dan pada akhirnya menunjukkan bahwa sejumlah besar pemukim tidak memiliki hak-hak sipil dan secara brutal dan kejam dipaksa bekerja untuk pemerintah dan koloni kulit putih. Setelah memperjuangkan kemerdekaan melawan kekuatan kolonial di Afrika. Namun karena negara Afrika sejak awal terdiri dari berbagai suku, ras, dan etnis, berbagai permasalahan seperti masalah persatuan nasional masih terus bermunculan hingga berujung pada perebutan kekuasaan dan perang saudara yang biasa terjadi di Afrika.

G. Latihan

Kerjakanlah latihan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Bagaimana Kekuasaan Bangsa Jerman di Afrika?
2. Bagaimana Kekuasaan Bangsa Spanyol di Afrika?
3. Bagaimana Kekuasaan Bangsa Portugal di Afrika?
4. Bagaimana Gerakan Kemerdekaan Negara-Negara Kolonial di Afrika?

H. Rujukan

Atma Jaya. (2009). *Uma Fukun Timor Lorosa' : Parliament Building República Democrática de Timor Lest. Yogyakarta University*, 1–16.

Berkin Carol, D. (2013). *Making America A History Of United States Brief Fifth Edition. Boston: Wadsworth.*

Darsiti, S. (1969). *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Moderen: Jilid 1. Yogyakarta.*

Darsiti, S. (2012). *SEJARAH AFRIKA. Yogyakarta: Ombak.*

DIPOYUDO, K. (n.d.). *MASALAH RASIAL DI AFRIKA SELATAN* (hal. 125–145). <https://journals.csis.or.id/index.php/analisis/article/download/70/50/85>

Hadiyanto. (2019). *Kolonisasi Terhadap Masyarakat Kulit Hitam. Jurnal Humanika, 19(01), 25–27.*

Hadiyanto, . (2016). *Representasi Kolonisasi Terhadap Masyarakat Kulit Hitam Afrika Dalam Novel Things Fall Apart Karya Chinua Achebe. Humanika, 19(1), 20.* <https://doi.org/10.14710/humanika.19.1.20-34>

Indah Mutia Rahma. (2023). *PERBUDAKAN DI AFRIKA TENGAH PADA MASA KOLONIAL PERANCIS DI TAHUN 1881-1914. Skripsi, 1–67.* <http://digilib.unila.ac.id/76585/3/3>. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Mahendra, M. A., Rusadi, E. Y., & Dzakiruddin, M. (2022). *Kemerdekaan Timor*

- Portugis sebagai The New World Order Portugal. *Jurnal Al Ma 'Arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(1), 21–28.
- Nurlaila, A. (2019). Kolonialisme Spanyol dan Portugal di Afrika. *Universitas Siliwangi*.
- Pratigny, W. E., Sjahril, S., Karnida, A. M., Hadiman, A., Ariastuti, D., Upiastirin, A., & Beslit, C. (2022). *Indonesia-Namibia*.
- Rachman, A. (1974). AFRIKA BERGOLAK TERUS. *Journals.csis.or.id*.
<http://journals.csis.or.id/index.php/analisis/article/download/244/467>
- Riyadi. (2016). Sejarah Afrika Dari Masa Kuno Sampai Modern. In *Unesa Press* (Nomor Riyadi. (2016). Sejarah Afrika Dari Masa Kuno Sampai Modern. Unesa Press, 128+vii.).
- Smith, W. D. (1974). The Ideology of German Colonialism, 1840-1906. *The Journal of Modern History*, 46(4).
- Sulistiowati, I. (2021). *PASCA PERANG DUNIA II AFRICAN ECONOMIC AND POLITICAL SYMPTOMS POST WORLD WAR II*. 17(1).
- Wari, N. P. (2020). Ekspansi Dan Imperialisme Barat Kenegeri Negeeri Islam Hingga Jatuhnya Khalifah Utsmani Turki. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 54–63.